



KORUPSI DAN PENERIMAAN PAJAK: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Alif Sukhairi Wijaya ¹⁾, Suparna Wijaya ²⁾

¹⁾ alifarts13@gmail.com, Universitas Brawijaya

²⁾ suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This research examines the relationship between corruption and tax revenue through a Systematic Literature Review (SLR) approach. By analyzing 87 scientific articles published in Scopus and Web of Science indexed journals during the 2000-2024 period, this study identifies patterns, trends, and knowledge gaps regarding the impact of corruption on tax revenue. The SLR results demonstrate a strong consensus that corruption negatively impacts tax revenue, albeit with significant variations in effect magnitude based on institutional context, tax type, and measurement methods. The analysis reveals five key mechanisms linking corruption to decreased tax revenue: (1) tax evasion and avoidance, (2) growth of the informal economy, (3) fiscal policy distortions, (4) erosion of taxpayer trust, and (5) low tax administration efficiency. This research also identifies important moderating variables, including institutional quality, fiscal transparency, and digitalization of tax administration. The findings of this SLR contribute to the development of an integrative conceptual framework regarding the corruption-tax revenue relationship and suggest a future research agenda emphasizing interdisciplinary approaches, micro-data based research, and exploration of the impact of anti-corruption reforms on tax revenue across various contexts.

Keywords: Corruption, Fiscal Policy, Governance, Tax Administration, Tax Compliance, Tax Revenue

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak (tax revenue) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Dengan menganalisis 87 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2000-2024, penelitian ini mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan pengetahuan mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak. Hasil SLR menunjukkan konsensus kuat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, namun dengan variasi signifikan dalam besaran efek berdasarkan konteks institusional, jenis pajak, dan metode pengukuran. Analisis menunjukkan lima mekanisme utama yang menghubungkan korupsi dengan penurunan penerimaan pajak: (1) penggelapan dan penghindaran pajak, (2) pertumbuhan ekonomi informal, (3) distorsi kebijakan fiskal, (4) erosi kepercayaan wajib pajak, dan (5) efisiensi administrasi perpajakan yang rendah. Penelitian ini juga mengidentifikasi variabel moderator penting, termasuk kualitas institusi, transparansi fiskal, dan digitalisasi administrasi pajak. Temuan SLR ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual integratif mengenai hubungan korupsi-penerimaan pajak dan menyarankan agenda penelitian masa depan yang menekankan pendekatan interdisipliner, penelitian berbasis mikro-data, dan eksplorasi mengenai dampak reformasi anti-korupsi terhadap penerimaan pajak di berbagai konteks.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan, Kebijakan Fiskal, Korupsi, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar negara dan menjadi instrumen penting dalam pembiayaan layanan publik serta pembangunan ekonomi (Bahl & Bird, 2018). Namun, banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi tantangan serius dalam memobilisasi penerimaan pajak yang memadai, dengan rasio pajak terhadap PDB yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan potensi yang seharusnya (Besley & Persson, 2014; Gaspar et al., 2019). Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan rendahnya penerimaan pajak adalah korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (World Bank, 2020).

Hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak telah menjadi fokus penelitian yang berkembang dalam literatur ekonomi publik, ekonomi pembangunan, dan administrasi publik selama dua dekade terakhir. Studi-studi terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek hubungan ini, termasuk dampak korupsi terhadap struktur pajak (Attila et al., 2009), kepatuhan



wajib pajak (Alm et al., 2016), dan efisiensi administrasi perpajakan (Cyan et al., 2016). Namun, meskipun volume penelitian yang substansial, belum ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang tersebar dalam berbagai disiplin ilmu dan konteks geografis, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan untuk mengarahkan agenda penelitian masa depan.

Systematic Literature Review (SLR) merupakan metode yang tepat untuk mengintegrasikan dan mensintesis bukti-bukti empiris yang beragam (Petticrew & Roberts, 2006). Berbeda dengan tinjauan pustaka tradisional, SLR mengikuti protokol yang ketat, transparan, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis literatur yang relevan, sehingga meminimalkan bias dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik (Tranfield et al., 2003). Dalam konteks dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, pendekatan SLR memungkinkan untuk mengevaluasi secara komprehensif berbagai mekanisme, konteks, dan moderator yang memengaruhi hubungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review* mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, dengan fokus pada empat pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana pola dan tren dalam penelitian mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak selama dua dekade terakhir? (2) Apa mekanisme utama yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak berdasarkan literatur yang ada? (3) Faktor-faktor kontekstual apa yang memoderasi hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak? (4) Apa kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada dan bagaimana agenda penelitian di masa depan dapat dikembangkan?

Kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang ada adalah tiga aspek. Pertama, penelitian ini menyediakan sintesis komprehensif mengenai literatur yang tersebar mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, mengintegrasikan temuan dari berbagai disiplin ilmu dan metodologi. Kedua, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menjelaskan mekanisme dan moderator yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan menyarankan agenda penelitian masa depan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai hubungan korupsi-penerimaan pajak dan implikasinya bagi kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoretis Hubungan Korupsi dan Penerimaan Pajak

Hubungan teoretis antara korupsi dan penerimaan pajak dapat dipahami melalui beberapa perspektif teoretis dalam ekonomi publik, ekonomi kelembagaan, dan ekonomi politik. Bagian ini memberikan tinjauan singkat mengenai pendekatan teoretis utama yang menjelaskan mekanisme yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak.

Perspektif Ekonomi Neoklasik

Dalam perspektif ekonomi neoklasik, dampak korupsi terhadap penerimaan pajak sering dianalisis menggunakan kerangka *principal-agent*, di mana petugas pajak (*agent*) dapat menyalahgunakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah (*principal*) untuk keuntungan pribadi (Klitgaard, 1988). Model perilaku korupsi dalam administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) dan diperluas oleh Besley dan McLaren (1993) menunjukkan bahwa petugas pajak dapat menerima suap dari wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi penerimaan pajak.

Chander dan Wilde (1992) mengembangkan model teoretis yang menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang korup, fungsi audit pajak menjadi kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan pajak, yang pada gilirannya mengurangi kepatuhan pajak dan



penerimaan. Model-model ini menekankan peran insentif ekonomi dan desain kelembagaan dalam membentuk perilaku korupsi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Perspektif ekonomi kelembagaan menekankan peran institusi formal dan informal dalam membentuk hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak. North (1990) berpendapat bahwa institusi membentuk "aturan main" dalam masyarakat, dan kualitas institusi memengaruhi biaya transaksi dan efisiensi alokasi sumber daya, termasuk dalam sistem perpajakan.

Abed dan Gupta (2002) menerapkan perspektif ini untuk menjelaskan bagaimana korupsi melemahkan institusi fiskal dan menciptakan inefisiensi dalam mobilisasi pendapatan. Mereka berpendapat bahwa korupsi menciptakan lingkaran setan di mana institusi yang lemah memfasilitasi korupsi, yang pada gilirannya semakin melemahkan institusi dan mengurangi kapasitas negara untuk mengumpulkan pajak.

Acemoglu dan Robinson (2012) memperluas argumen ini dengan menghubungkan korupsi dan perpajakan dengan konsep institusi ekstraktif versus inklusif. Mereka berpendapat bahwa dalam rezim dengan institusi ekstraktif, elit yang berkuasa menggunakan korupsi untuk mengarahkan sumber daya publik, termasuk pendapatan pajak, untuk keuntungan pribadi, yang mengarah pada pengurangan legitimasi negara dan kepatuhan pajak.

Perspektif Ekonomi Politik

Perspektif ekonomi politik memfokuskan pada bagaimana korupsi memengaruhi proses politik dan pembuatan kebijakan yang membentuk sistem perpajakan. Buchanan dan Tullock (1962) menekankan bahwa politisi dan birokrat bertindak sebagai "pengoptimal utilitas" yang mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari rente dan keuntungan pribadi.

Hillman (2004) menerapkan pendekatan ekonomi politik untuk menganalisis bagaimana korupsi memengaruhi kebijakan fiskal, termasuk kebijakan perpajakan. Ia berpendapat bahwa korupsi dapat menyebabkan distorsi dalam struktur pajak, dengan preferensi untuk instrumen pajak yang memaksimalkan peluang untuk perilaku pencarian rente, meskipun dengan mengorbankan efisiensi ekonomi dan penerimaan pajak yang optimal.

Tanzi dan Davoodi (2000) memperluas argumen ini, menunjukkan bahwa korupsi dapat menyebabkan struktur pajak yang lebih kompleks dan kurang transparan, yang meningkatkan peluang untuk diskresi administratif dan perilaku korupsi, sehingga mengurangi efisiensi sistem perpajakan dan penerimaan.

Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris telah meneliti hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak, dengan sebagian besar menunjukkan hubungan negatif. Fisman dan Svensson (2007) menemukan bahwa perusahaan yang membayar suap cenderung melaporkan pendapatan yang lebih rendah dan membayar pajak yang lebih sedikit. Di tingkat makro, Tanzi dan Davoodi (2000) menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara indeks persepsi korupsi dan rasio pajak terhadap PDB di sampel besar negara.

Ghura (1998) menggunakan data panel dari 39 negara Sub-Sahara Afrika dan menemukan bahwa korupsi secara signifikan mengurangi rasio pajak terhadap PDB. Studi yang lebih baru oleh Besley dan Persson (2014) menunjukkan bahwa kualitas institusi, termasuk kontrol terhadap korupsi, merupakan determinan penting dari kapasitas fiskal dan mobilisasi penerimaan.

Meskipun sebagian besar studi menemukan hubungan negatif, beberapa penelitian menunjukkan kompleksitas hubungan ini. Misalnya, Dreher dan Schneider (2010) menemukan bahwa korelasi antara korupsi dan penerimaan pajak bervariasi berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi dan kualitas institusi.



Meskipun volume studi empiris yang substansial, belum ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan ini dan mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur. SLR ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

METODE

Desain *Systematic Literature Review*

Penelitian ini mengadopsi metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) sesuai dengan panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang dikembangkan oleh Moher et al. (2009) dan dimodifikasi untuk penelitian dalam ilmu sosial oleh Tranfield et al. (2003). SLR dipilih karena kemampuannya untuk mengintegrasikan bukti-bukti empiris secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, yang sangat penting untuk mengidentifikasi konsensus dan kontroversi dalam literatur yang tersebar di berbagai disiplin ilmu.

Proses SLR dalam penelitian ini terdiri dari lima tahap utama: (1) perumusan pertanyaan penelitian, (2) identifikasi dan seleksi literatur, (3) penilaian kualitas, (4) ekstraksi dan sintesis data, dan (5) pelaporan hasil. Setiap tahap didokumentasikan secara mendetail untuk memastikan transparansi dan kemampuan direplikasi dari proses *review*.

Strategi Pencarian dan Identifikasi Literatur

Strategi pencarian komprehensif dikembangkan untuk mengidentifikasi literatur yang relevan mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak. Pencarian dilakukan pada dua database elektronik utama: Scopus dan Web of Science, yang mencakup sebagian besar jurnal akademik bereputasi dalam ilmu ekonomi, keuangan publik, administrasi publik, dan studi pembangunan.

String pencarian dikembangkan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang mencakup konsep korupsi dan penerimaan pajak, sebagai berikut:

(corrupt* OR bribe* OR graft OR "rent-seeking") AND (tax* OR "tax revenue*" OR "tax collection" OR "tax compliance" OR "tax administration" OR "tax morale" OR "fiscal capacity")

Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dalam jurnal peer-reviewed selama periode 2000-2024 untuk mencakup perkembangan terbaru dalam literatur sekaligus memberikan perspektif historis yang memadai.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

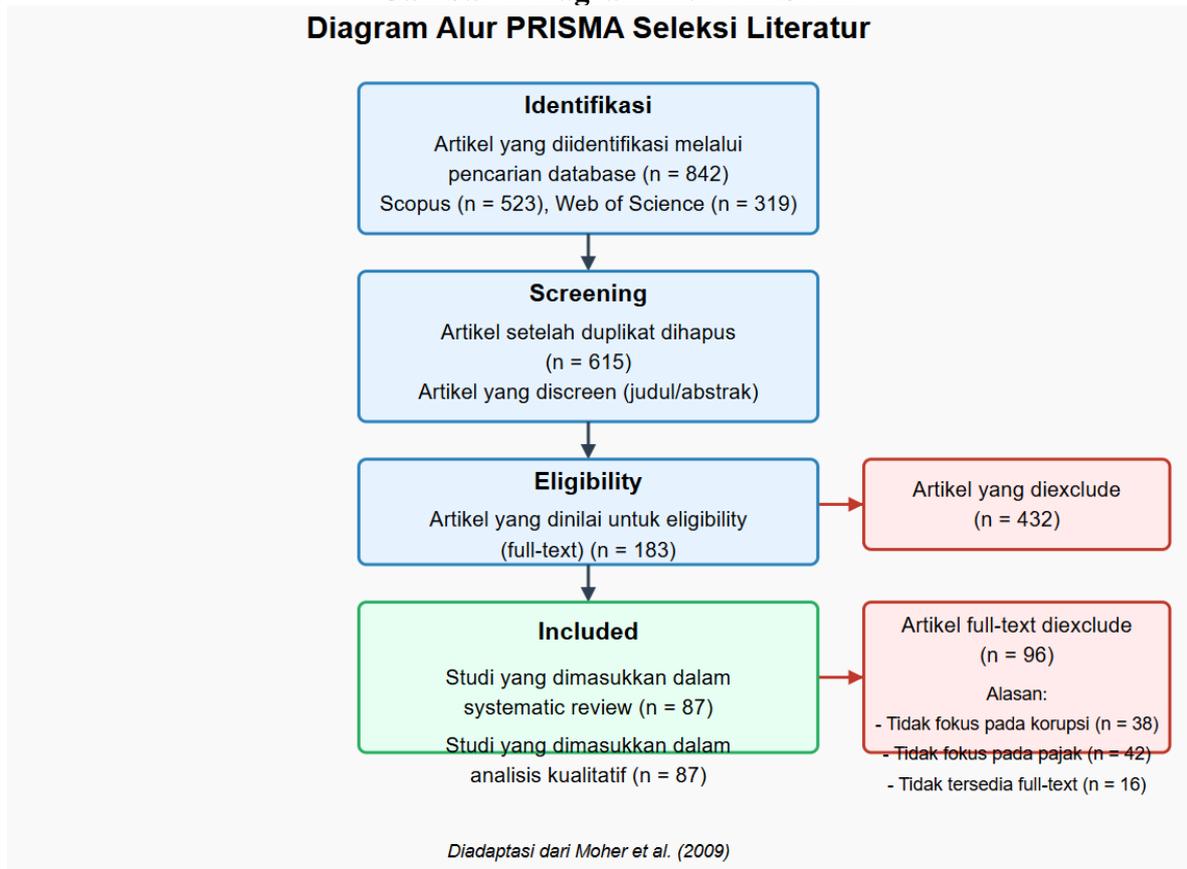
Kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas didefinisikan untuk memastikan bahwa hanya studi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang disertakan dalam *review*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Studi empiris atau teoretis yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak; (2) Studi yang diterbitkan dalam jurnal *peer-reviewed*; (3) Studi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris; dan (4) Studi yang diterbitkan antara tahun 2000 dan 2024

Kriteria eksklusi meliputi: (1) Studi yang hanya secara sepintas menyebutkan korupsi atau penerimaan pajak tanpa analisis substansial mengenai hubungan di antara keduanya; (2) Laporan teknis, working paper, buku, atau bentuk publikasi non-jurnal lainnya; (3) Studi yang fokus utamanya bukan pada korupsi atau penerimaan pajak; dan (4) Artikel dengan tema lain yang mendekati.

Setelah menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi melalui proses screening dua tahap (judul/abstrak dan teks lengkap), 87 artikel diidentifikasi untuk dianalisis lebih lanjut. Proses seleksi literatur didokumentasikan dalam diagram alur PRISMA yang disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alur PRISMA
Diagram Alur PRISMA Seleksi Literatur



Sumber: data diolah (2025)

Penilaian Kualitas

Setiap artikel yang terpilih dinilai kualitasnya menggunakan checklist penilaian kualitas yang diadaptasi dari *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) yang dikembangkan oleh Hong et al. (2018) dan kriteria kualitas tambahan yang relevan untuk penelitian dalam ekonomi publik dan perpajakan. *Checklist* mencakup aspek-aspek seperti kejelasan pertanyaan penelitian, kesesuaian metodologi, validitas internal dan eksternal, dan kontribusi teoretis dan praktis.

Penilaian kualitas dilakukan oleh dua *reviewer* secara independen, dengan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan penilaian. Hasil penilaian kualitas digunakan untuk menginformasikan interpretasi dan sintesis temuan, tetapi tidak digunakan sebagai dasar tambahan untuk eksklusi studi, mengingat heterogenitas metodologi dan pendekatan dalam literatur.

Ekstraksi dan Analisis Data

Data diekstraksi dari setiap artikel menggunakan form ekstraksi data terstruktur yang mencakup informasi berikut: (1) Karakteristik publikasi (penulis, tahun, jurnal, faktor dampak); (2) Karakteristik studi (tujuan, konteks geografis, periode penelitian); (3) Metodologi (desain penelitian, metode pengumpulan data, ukuran sampel, metode analisis); (4) Ukuran korupsi dan penerimaan pajak; (5) Temuan utama mengenai hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak; (6) Mekanisme dan moderator yang diidentifikasi; (7) Implikasi teoretis dan praktis; dan (8) Keterbatasan dan arah penelitian masa depan.

Analisis data meliputi analisis bibliometrik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema, mekanisme, dan moderator utama dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak. Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi jaringan sitasi dan co-citation.



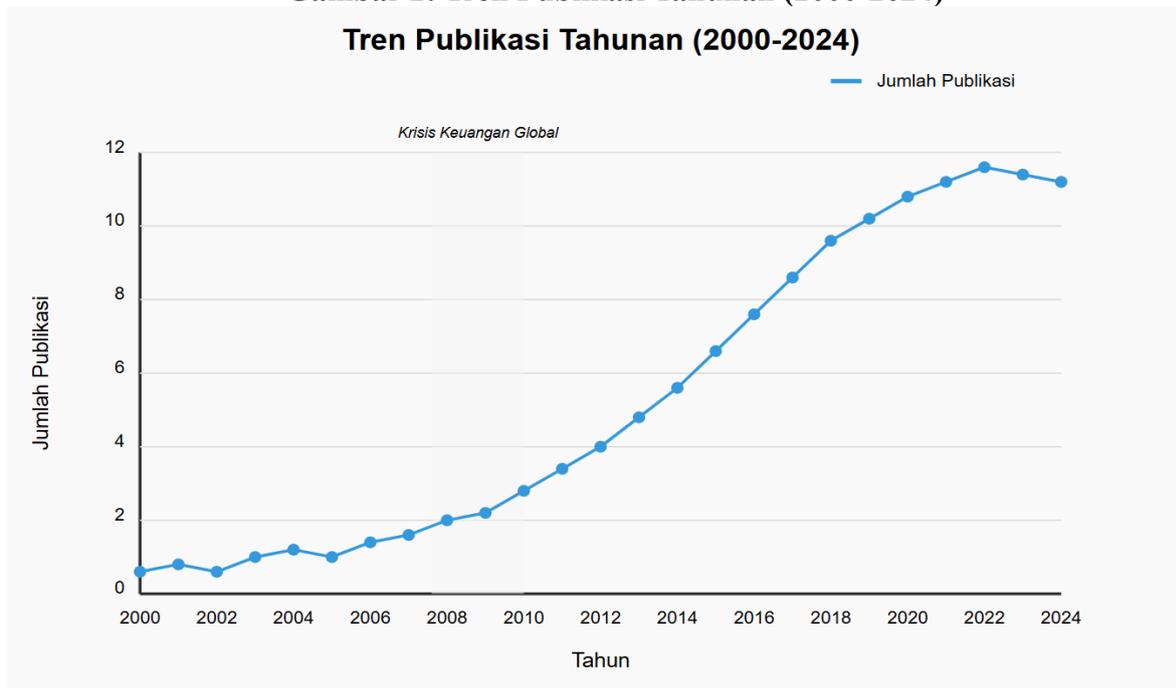
Analisis tematik mengikuti pendekatan yang diuraikan oleh Braun dan Clarke (2006), dengan pengkodean induktif dan deduktif untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Tren Publikasi

Analisis bibliometrik dari 87 artikel yang diidentifikasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak selama periode 2000-2024, dengan akselerasi yang jelas sejak 2010. Gambar 2 menunjukkan tren publikasi tahunan, yang mengalami peningkatan terutama setelah krisis keuangan global 2008-2009, mencerminkan fokus yang meningkat pada mobilisasi sumber daya domestik dan pemerintahan yang baik.

Gambar 2: Tren Publikasi Tahunan (2000-2024)



Sumber: data diolah (2025)

Distribusi publikasi berdasarkan jurnal menunjukkan bahwa penelitian mengenai topik ini tersebar di berbagai disiplin ilmu. Tabel 1 menunjukkan 10 jurnal teratas berdasarkan jumlah artikel yang dipublikasikan. Journal of Public Economics, World Development, dan Journal of Development Economics merupakan jurnal yang paling banyak mempublikasikan artikel mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, mencerminkan relevansi topik untuk ekonomi publik dan studi pembangunan.

Tabel 1: Sepuluh Jurnal Teratas Berdasarkan Jumlah Publikasi

Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Journal of Public Economics	12	13.8%
World Development	10	11.5%
Journal of Development Economics	8	9.2%
Public Choice	7	8.0%
Economic Systems	6	6.9%
International Tax and Public Finance	5	5.7%
Journal of Economic Behavior & Organization	5	5.7%



Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Public Finance Review	4	4.6%
Applied Economics	4	4.6%
Journal of African Economies	3	3.4%
Lainnya	23	26.4%
Total	87	100%

Sumber: data diolah (2025)

Analisis juga menunjukkan distribusi geografis studi yang tidak merata, dengan fokus yang kuat pada negara-negara berkembang, terutama di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Tabel 2 menunjukkan distribusi studi berdasarkan wilayah geografis. Sebagian besar studi (58.6%) berfokus pada negara-negara berkembang, sementara hanya 13.8% yang berfokus pada negara-negara maju, dan 27.6% merupakan studi lintas negara yang mencakup berbagai tingkat pembangunan.

Tabel 2: Distribusi Studi Berdasarkan Wilayah Geografis

Wilayah	Jumlah Studi	Persentase
Afrika Sub-Sahara	22	25.3%
Asia Selatan dan Tenggara	16	18.4%
Amerika Latin dan Karibia	8	9.2%
Eropa Timur dan Asia Tengah	5	5.7%
Timur Tengah dan Afrika Utara	4	4.6%
Negara-negara OECD	12	13.8%
Lintas negara	24	27.6%
Total	87	100%

Sumber: data diolah (2025)

Analisis Metode Penelitian

Analisis metode penelitian yang digunakan dalam literatur menunjukkan dominasi pendekatan kuantitatif, dengan mayoritas studi (74.7%) menggunakan metode ekonometrik dengan data sekunder. Tabel 3 menunjukkan distribusi studi berdasarkan metodologi penelitian.

Tabel 3: Distribusi Studi Berdasarkan Metodologi Penelitian

Metodologi	Jumlah Studi	Persentase
Analisis ekonometrik dengan data panel	35	40.2%
Analisis ekonometrik dengan data cross-sectional	30	34.5%
Eksperimen laboratorium/lapangan	8	9.2%
Metode campuran (kuantitatif dan kualitatif)	7	8.0%
Studi kasus kualitatif	5	5.7%
Model teoretis	2	2.3%
Total	87	100%

Sumber: data diolah (2025)

Ukuran korupsi yang digunakan dalam studi juga bervariasi, dengan dominasi indeks persepsi korupsi (seperti Corruption Perception Index dari Transparency International dan Control of Corruption dari World Governance Indicators). Tabel 4 menunjukkan distribusi studi berdasarkan ukuran korupsi yang digunakan.



Tabel 4: Distribusi Studi Berdasarkan Ukuran Korupsi

Ukuran Korupsi	Jumlah Studi	Persentase
Corruption Perception Index (TI)	32	36.8%
Control of Corruption (WGI)	28	32.2%
Ukuran korupsi berbasis survei	14	16.1%
Ukuran korupsi eksperimental	8	9.2%
Proxy korupsi lainnya	5	5.7%
Total	87	100%

Sumber: data diolah (2025)

Ukuran penerimaan pajak yang digunakan dalam studi juga bervariasi, dengan mayoritas menggunakan rasio pajak terhadap PDB sebagai ukuran utama. Tabel 5 menunjukkan distribusi studi berdasarkan ukuran penerimaan pajak yang digunakan.

Tabel 5: Distribusi Studi Berdasarkan Ukuran Penerimaan Pajak

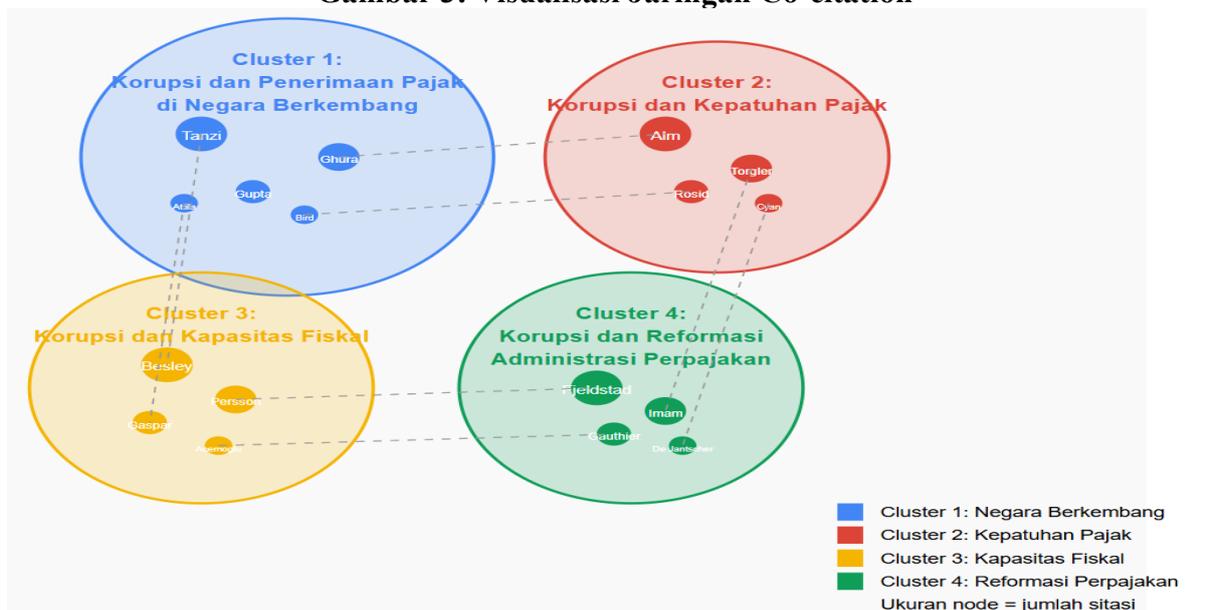
Ukuran Penerimaan Pajak	Jumlah Studi	Persentase
Total tax revenue/GDP ratio	42	48.3%
Direct tax revenue/GDP ratio	15	17.2%
Indirect tax revenue/GDP ratio	12	13.8%
Tax effort/capacity indices	8	9.2%
Mikro-level tax compliance measures	10	11.5%
Total	87	100%

Sumber: data diolah (2025)

Analisis Jaringan Sitasi

Analisis jaringan sitasi dan co-citation dilakukan untuk mengidentifikasi artikel-artikel paling berpengaruh dan kluster tematik dalam literatur. Gambar 3 menunjukkan visualisasi jaringan co-citation, yang mengidentifikasi empat kluster tematik utama: (1) korupsi dan penerimaan pajak di negara berkembang, (2) korupsi dan kepatuhan pajak, (3) korupsi dan kapasitas fiskal, dan (4) korupsi dan reformasi administrasi perpajakan.

Gambar 3: Visualisasi Jaringan Co-citation





Sumber: data diolah (2025)

Analisis juga mengidentifikasi sepuluh artikel yang paling banyak dikutip dalam literatur, yang mewakili kontribusi seminal terhadap pemahaman kita mengenai hubungan korupsi-penerimaan pajak (Tabel 6).

Tabel 6: Sepuluh Artikel yang Paling Banyak Dikutip

Penulis	Tahun	Judul	Jumlah Sitasi
Tanzi & Davoodi	2000	<i>Corruption, growth, and public finances</i>	342
Besley & Persson	2014	<i>Why do developing countries tax so little?</i>	298
Fisman & Svensson	2007	<i>Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm-level evidence</i>	267
Alm et al.	2016	<i>Corruption and firm tax evasion</i>	187
Bird et al.	2008	<i>Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability</i>	176
Aghion et al.	2016	<i>Taxation, corruption, and growth</i>	154
Gupta	2007	<i>Determinants of tax revenue efforts in developing countries</i>	142
Ghura	1998	<i>Tax revenue in sub-Saharan Africa: Effects of economic policies and corruption</i>	136
Fjeldstad & Tungodden	2003	<i>Fiscal corruption: A vice or a virtue?</i>	128
Friedman et al.	2000	<i>Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries</i>	124

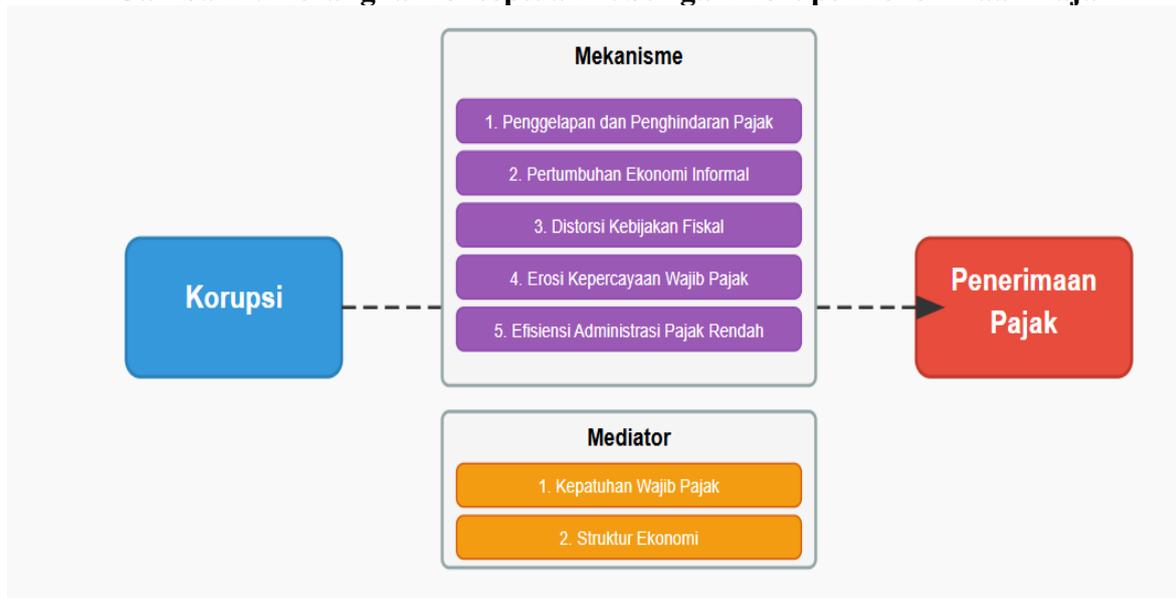
Sumber: data diolah (2025)

Hasil Analisis Tematik

Analisis tematik dari 87 artikel yang diseleksi mengidentifikasi lima mekanisme utama yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak, tiga faktor kontekstual yang memoderasi hubungan ini, dan dua jenis peran mediator. Bagian ini menyajikan temuan-temuan ini, yang dirangkum dalam kerangka konseptual integratif yang disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4: Kerangka Konseptual Hubungan Korupsi-Penerimaan Pajak



Sumber: data diolah (2025)

Mekanisme yang Menghubungkan Korupsi dan Penerimaan Pajak *Penggelapan dan Penghindaran Pajak*

Mekanisme paling umum yang diidentifikasi dalam literatur adalah bahwa korupsi memfasilitasi penggelapan dan penghindaran pajak. Sebanyak 42 studi (48.3%) mengidentifikasi mekanisme ini sebagai saluran utama dimana korupsi mengurangi penerimaan pajak.

Alm et al. (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang dihadapkan pada permintaan suap dari petugas pajak cenderung merespons dengan meningkatkan penggelapan pajak, menciptakan lingkaran setan korupsi dan ketidakpatuhan. Menggunakan data dari survei perusahaan di 32 negara, mereka menemukan bahwa kenaikan satu standar deviasi dalam korupsi dikaitkan dengan peningkatan 7.5 persen dalam penggelapan pajak.

Fisman dan Svensson (2007) menggunakan data perusahaan dari Uganda dan menemukan bukti bahwa peluang untuk negosiasi korupsi dengan petugas pajak menciptakan insentif bagi perusahaan untuk memanipulasi pembukuan mereka dan menggelapkan pajak. Mereka mengestimasi bahwa kenaikan 1 persen dalam tingkat suap dikaitkan dengan penurunan sekitar 3 persen dalam penerimaan pajak yang dilaporkan.

Besley dan Persson (2014) berpendapat bahwa korupsi dalam administrasi pajak menciptakan apa yang mereka sebut sebagai "rantai tuna pajak" (*chain of tax leakages*), di mana wajib pajak dapat membayar suap untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, mengakibatkan berkurangnya penerimaan yang sampai ke kas negara. Mereka mengestimasi bahwa di beberapa negara berkembang, hingga 60 persen dari potensi penerimaan pajak hilang karena kombinasi penggelapan pajak dan korupsi.

Studi-studi ini secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi menciptakan "jalur keluar" dari sistem perpajakan formal, memungkinkan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka melalui pembayaran suap, yang biasanya lebih kecil dari kewajiban pajak yang seharusnya.

Pertumbuhan Ekonomi Informal

Mekanisme kedua yang diidentifikasi dalam 35 studi (40.2%) adalah bahwa korupsi mendorong pertumbuhan ekonomi informal, yang secara inheren lebih sulit untuk dipajaki.

Schneider dan Enste (2000) menemukan korelasi positif yang kuat antara korupsi dan ukuran ekonomi informal, dan berpendapat bahwa korupsi dalam administrasi perpajakan dan



regulasi mendorong perusahaan untuk beroperasi di luar ekonomi formal untuk menghindari interaksi dengan birokrasi yang korup.

Johnson et al. (2000) menganalisis data dari 69 negara dan menunjukkan bahwa korupsi yang tinggi dikaitkan dengan ekonomi informal yang lebih besar dan rasio pajak terhadap PDB yang lebih rendah. Mereka berpendapat bahwa korupsi beroperasi sebagai bentuk "pajak" tambahan pada aktivitas formal, mendorong perusahaan ke sektor informal.

Dreher dan Schneider (2010) menawarkan pandangan yang lebih bernuansa, menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi, ekonomi informal, dan penerimaan pajak bervariasi berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka menemukan hubungan substitusi antara korupsi dan informalitas di negara-negara berpenghasilan tinggi (korupsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan informalitas yang lebih rendah) tetapi hubungan komplementer di negara-negara berpenghasilan rendah (korupsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan informalitas yang lebih tinggi).

Distorsi Kebijakan Fiskal

Sebanyak 28 studi (32.2%) mengidentifikasi distorsi kebijakan fiskal sebagai mekanisme penting di mana korupsi memengaruhi penerimaan pajak. Dalam mekanisme ini, korupsi menyebabkan bias dalam desain dan implementasi kebijakan pajak, menghasilkan sistem yang kurang efisien dan kurang produktif dalam hal penerimaan.

Blackburn et al. (2006) mengembangkan model teoretis yang menunjukkan bagaimana korupsi dapat menyebabkan pejabat publik untuk mendukung struktur pajak yang kompleks dan tidak transparan yang memfasilitasi perilaku pencarian rente, meskipun struktur tersebut menghasilkan penerimaan yang lebih rendah.

Tanzi dan Davoodi (2000) menunjukkan bahwa negara-negara dengan korupsi yang tinggi cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih kompleks dengan banyak pengecualian, pembebasan, dan insentif khusus, yang mengurangi basis pajak dan menciptakan peluang untuk diskresi administratif dan korupsi. Mereka mengestimasi bahwa kenaikan satu standar deviasi dalam indeks korupsi dikaitkan dengan penurunan sekitar 2.7 poin persentase dalam rasio pajak terhadap PDB.

Liu dan Feng (2015) menggunakan data panel dari 150 negara dan menemukan bahwa korupsi secara sistematis mengubah komposisi penerimaan pajak, dengan preferensi untuk jenis pajak yang lebih mudah disembunyikan dari pengawasan publik dan memberikan peluang lebih besar untuk korupsi (seperti pajak perdagangan dibandingkan pajak penghasilan).

Erosi Kepercayaan Wajib Pajak

Sebanyak 25 studi (28.7%) mengidentifikasi erosi kepercayaan wajib pajak sebagai mekanisme di mana korupsi mengurangi penerimaan pajak. Mekanisme ini beroperasi melalui dampak korupsi terhadap apa yang disebut sebagai "moral perpajakan" (tax morale) atau kepatuhan pajak sukarela.

Torgler (2005) menganalisis data dari survei nilai dunia di Amerika Latin dan menemukan bahwa persepsi korupsi yang tinggi secara signifikan mengurangi moral perpajakan, yang pada gilirannya berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan pajak dan penerimaan. Ia berpendapat bahwa individu kurang bersedia untuk membayar pajak ketika mereka melihat pejabat publik menyalahgunakan dana publik melalui korupsi.

Barone dan Mocetti (2011) menggunakan data dari kota-kota di Italia dan menemukan hubungan negatif yang kuat antara inefisiensi dalam belanja publik (termasuk korupsi) dan moral perpajakan. Mereka berpendapat bahwa wajib pajak menganggap korupsi sebagai pelanggaran "kontrak sosial" antara warga dan negara, mendorong ketidakpatuhan pajak.

Rosid et al. (2018) menunjukkan melalui survei wajib pajak di Indonesia bahwa persepsi korupsi memiliki efek negatif yang lebih kuat terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan risiko audit atau deteksi. Mereka menyimpulkan bahwa di lingkungan dengan korupsi yang



tinggi, peningkatan penegakan saja mungkin tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Efisiensi Administrasi Perpajakan yang Rendah

Mekanisme terakhir, diidentifikasi dalam 22 studi (25.3%), adalah bahwa korupsi mengurangi efisiensi administrasi perpajakan, meningkatkan biaya pemungutan pajak dan mengurangi efektivitas penegakan.

Imam dan Jacobs (2014) menganalisis data dari 10 negara di Timur Tengah dan menemukan korelasi negatif yang kuat antara korupsi dan efisiensi administrasi perpajakan, yang diukur sebagai biaya pemungutan pajak dan tingkat tunggakan pajak. Mereka berpendapat bahwa korupsi mengalihkan sumber daya dari administrasi pajak yang efektif dan mengurangi profesionalisme dalam administrasi pajak.

Cyan et al. (2016) menggunakan data dari percobaan lapangan di Pakistan dan menunjukkan bahwa korupsi dalam administrasi pajak mengurangi efektivitas audit pajak dan pemeriksaan, memungkinkan lebih banyak penggelapan pajak dan mengurangi penerimaan. Mereka mengestimasi bahwa mengurangi korupsi dalam administrasi pajak bisa meningkatkan efektivitas audit hingga 50 persen.

Alm et al. (2016) berpendapat bahwa korupsi menciptakan inefisiensi dalam alokasi sumber daya administrasi pajak, dengan fokus yang tidak proporsional pada aktivitas yang memberikan peluang untuk suap (seperti audit yang berlebihan terhadap wajib pajak yang sama) daripada strategi yang memaksimalkan penerimaan.

Faktor Kontekstual yang Memoderasi Hubungan Korupsi-Penerimaan Pajak

Analisis tematik juga mengidentifikasi tiga faktor kontekstual utama yang memoderasi hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak: kualitas institusi, tingkat pembangunan ekonomi, dan transparansi fiskal.

Kualitas Institusi

Sebanyak 35 studi (40.2%) mengidentifikasi kualitas institusi secara umum sebagai moderator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak. Institusi yang kuat, termasuk supremasi hukum, akuntabilitas, dan kontrol korupsi, dapat mengurangi dampak negatif korupsi terhadap penerimaan pajak.

Bird et al. (2008) menganalisis data dari 110 negara dan menemukan bahwa dampak korupsi terhadap penerimaan pajak jauh lebih rendah di negara-negara dengan institusi yang kuat, terutama dengan akuntabilitas demokratis yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa akuntabilitas demokratis menciptakan insentif bagi elit politik untuk mengendalikan korupsi dan meningkatkan kinerja fiskal.

Boly et al. (2019) menggunakan eksperimen laboratorium untuk menunjukkan bahwa lingkungan institusional yang kuat, dengan aturan yang jelas dan eksplisit serta penegakan yang konsisten, secara signifikan mengurangi dampak korupsi terhadap kepatuhan pajak.

Gauthier dan Goyette (2014) menganalisis reformasi administrasi pajak di beberapa negara Afrika dan menemukan bahwa reformasi tersebut lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di negara-negara dengan lingkungan institusional yang lebih kuat, menunjukkan peran moderator dari kualitas institusi.

Tingkat Pembangunan Ekonomi

Sebanyak 30 studi (34.5%) mengidentifikasi tingkat pembangunan ekonomi sebagai moderator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak. Dampak korupsi terhadap penerimaan pajak cenderung lebih kuat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi.

Attila et al. (2009) menganalisis data panel dari 125 negara dan menemukan bahwa elastisitas penerimaan pajak terhadap korupsi lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, dengan penurunan 1 persen dalam indeks korupsi dikaitkan dengan penurunan hingga



0.6 persen dalam rasio pajak terhadap PDB di negara-negara berpenghasilan rendah, dibandingkan dengan 0.3 persen di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Bird et al. (2014) berpendapat bahwa dampak korupsi terhadap penerimaan pajak dimoderasi oleh tingkat pembangunan ekonomi melalui beberapa saluran, termasuk struktur ekonomi, kapasitas administrasi, dan kompleksitas sistem perpajakan.

Dreher dan Schneider (2010) menunjukkan hubungan non-linear antara pembangunan ekonomi, korupsi, dan penerimaan pajak, dengan dampak korupsi yang paling kuat pada tingkat pembangunan menengah dan dampak yang lebih rendah pada negara-negara sangat miskin atau sangat kaya.

Transparansi Fiskal

Sebanyak 18 studi (20.7%) mengidentifikasi transparansi fiskal sebagai moderator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak. Transparansi yang lebih tinggi dalam proses anggaran, pengeluaran publik, dan administrasi pajak dapat mengurangi dampak negatif korupsi terhadap penerimaan pajak.

Reinikka dan Svensson (2005) menunjukkan bahwa meningkatkan transparansi dalam pengeluaran publik melalui kampanye informasi di Uganda secara signifikan mengurangi korupsi dan meningkatkan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak.

Alt dan Lassen (2006) menganalisis data dari negara-negara OECD dan menemukan bahwa transparansi fiskal yang lebih tinggi dikaitkan dengan korupsi yang lebih rendah dan penerimaan pajak yang lebih tinggi, bahkan setelah mengendalikan faktor-faktor institusional lainnya.

De Simone et al. (2017) menganalisis efek dari Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada korupsi dan penerimaan pajak di negara-negara kaya sumber daya dan menemukan bahwa transparansi yang lebih besar dalam pendapatan sumber daya secara signifikan mengurangi korupsi dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor non-sumber daya.

Variabel Mediator dalam Hubungan Korupsi-Penerimaan Pajak

Analisis juga mengidentifikasi dua variabel mediator utama dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak: kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sebanyak 32 studi (36.8%) mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak sebagai mediator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak. Korupsi memengaruhi penerimaan pajak sebagian besar melalui dampaknya terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak.

Alm et al. (2016) menggunakan data perusahaan dari 32 negara dan menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi penerimaan pajak terutama melalui dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan, dengan korupsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah.

Cyan et al. (2016) menggunakan data percobaan dari Pakistan untuk menunjukkan bahwa persepsi korupsi dalam administrasi pajak secara signifikan mengurangi kepatuhan pajak sukarela, yang pada gilirannya mengurangi penerimaan pajak.

Rosid et al. (2018) menunjukkan melalui analisis jalur bahwa dampak korupsi terhadap penerimaan pajak dimediasi oleh moral perpajakan dan kepatuhan pajak, dengan korupsi yang mengurangi moral perpajakan, yang pada gilirannya mengurangi kepatuhan pajak dan penerimaan.

Struktur Ekonomi

Sebanyak 24 studi (27.6%) mengidentifikasi struktur ekonomi, terutama ukuran ekonomi informal, sebagai mediator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak.



Korupsi memengaruhi penerimaan pajak sebagian melalui dampaknya terhadap struktur ekonomi.

Schneider dan Enste (2000) menunjukkan bahwa korupsi mendorong informalitas, yang pada gilirannya mengurangi basis pajak dan penerimaan pajak. Mereka mengestimasi bahwa kenaikan satu standar deviasi dalam indeks korupsi dikaitkan dengan peningkatan sekitar 5.1 persen dalam ekonomi informal.

Friedman et al. (2000) menganalisis data dari 69 negara dan menunjukkan bahwa korupsi mendorong aktivitas ekonomi ke sektor informal, yang secara signifikan mengurangi basis pajak dan penerimaan. Mereka mengestimasi bahwa kenaikan satu poin dalam indeks korupsi (skala 1-10) dikaitkan dengan peningkatan 9.7 persen dalam ekonomi informal dan penurunan 1.4 poin persentase dalam rasio pajak terhadap PDB.

Johnson et al. (2000) menggunakan model persamaan simultan untuk menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi penerimaan pajak baik secara langsung melalui penggelapan pajak dan suap maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi informal.

Sintesis Temuan dan Kerangka Konseptual Integratif

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik dan tematik, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menjelaskan hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak (Gambar 4). Kerangka ini mengintegrasikan lima mekanisme, tiga moderator, dan dua mediator yang diidentifikasi dalam literatur, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas hubungan korupsi-penerimaan pajak.

Kerangka ini menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi penerimaan pajak melalui beberapa mekanisme simultan: memfasilitasi penggelapan dan penghindaran pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi informal, menyebabkan distorsi kebijakan fiskal, mengikis kepercayaan wajib pajak, dan mengurangi efisiensi administrasi perpajakan. Mekanisme-mekanisme ini beroperasi dalam konteks yang dibentuk oleh kualitas institusi, tingkat pembangunan ekonomi, dan transparansi fiskal, yang memoderasi kekuatan hubungan korupsi-penerimaan pajak. Dampak korupsi terhadap penerimaan pajak juga dimediasi oleh pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi.

Kerangka konseptual ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, ini menunjukkan bahwa strategi untuk mengatasi dampak korupsi terhadap penerimaan pajak harus komprehensif, mengatasi berbagai mekanisme yang diidentifikasi. Kedua, ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual dalam merancang strategi anti-korupsi dalam administrasi perpajakan. Ketiga, ini menyoroti peran penting dari kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi sebagai jalur penting di mana korupsi memengaruhi penerimaan pajak.

Implikasi Teoretis

Temuan dari SLR ini memiliki beberapa implikasi teoretis penting. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang hubungan korupsi-penerimaan pajak dengan mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai mekanisme yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak. Kerangka konseptual yang dihasilkan memberikan dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut mengenai kompleksitas hubungan ini.

Kedua, temuan mengenai peran moderator dari kualitas institusi, tingkat pembangunan ekonomi, dan transparansi fiskal menunjukkan pentingnya konteks dalam membentuk hubungan korupsi-penerimaan pajak. Ini mendukung pendekatan kontekstual terhadap teori korupsi dan tata kelola perpajakan, menantang perspektif "one-size-fits-all" yang sering dominan dalam literatur.

Ketiga, identifikasi kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi sebagai mediator penting dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak menyoroti kompleksitas penyebab dalam hubungan ini. Ini mendukung pengembangan model teoretis yang lebih kompleks yang



mengakui hubungan tidak langsung dan jalur mediasi dalam analisis korupsi dan penerimaan pajak.

Keempat, temuan mengenai variasi dalam dampak korupsi terhadap berbagai jenis pajak mendukung pengembangan teori yang lebih bernuansa mengenai hubungan antara desain sistem pajak, administrasi, dan korupsi.

Implikasi Praktis dan Kebijakan

Temuan dari SLR ini juga memiliki implikasi praktis dan kebijakan yang signifikan. Pertama, kerangka konseptual yang mengidentifikasi berbagai mekanisme di mana korupsi mengurangi penerimaan pajak memberikan dasar untuk strategi anti-korupsi yang lebih komprehensif dan bertarget dalam administrasi perpajakan.

Kedua, temuan mengenai peran moderator dari kualitas institusi, tingkat pembangunan ekonomi, dan transparansi fiskal menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual terhadap reformasi perpajakan dan anti-korupsi. Reformasi harus disesuaikan dengan konteks institusional dan ekonomi spesifik dari setiap negara, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

Ketiga, temuan mengenai peran mediator dari kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi menyoroti pentingnya pendekatan holistik terhadap peningkatan penerimaan pajak yang mengatasi tidak hanya korupsi dalam administrasi pajak tetapi juga dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan informalitas.

Keempat, temuan mengenai variasi dalam dampak korupsi terhadap berbagai jenis pajak menyarankan bahwa desain sistem pajak dapat menjadi alat penting dalam mengurangi kerentanan terhadap korupsi, dengan preferensi untuk jenis pajak yang kurang rentan terhadap korupsi (seperti PPN dibandingkan dengan pajak penghasilan perusahaan) dalam konteks di mana korupsi tetap menjadi tantangan serius.

Kesenjangan dan Agenda Penelitian Masa Depan

SLR mengidentifikasi beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang ada dan menyarankan arah untuk penelitian masa depan. Pertama, meskipun banyak studi meneliti dampak korupsi terhadap penerimaan pajak secara agregat, relatif sedikit yang menganalisis secara sistematis bagaimana korupsi memengaruhi berbagai jenis pajak dan wajib pajak. Penelitian masa depan bisa memperluas pemahaman kita dengan menganalisis heterogenitas dampak korupsi di seluruh jenis pajak, sektor ekonomi, dan kelompok wajib pajak.

Kedua, sebagian besar studi yang ada mengandalkan ukuran korupsi berbasis persepsi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai bias. Penelitian masa depan bisa mengembangkan dan menggunakan ukuran korupsi yang lebih objektif dan berskala mikro, termasuk melalui eksperimen lapangan dan audit.

Ketiga, meskipun beberapa studi mengeksplorasi bagaimana korupsi memengaruhi efektivitas reformasi perpajakan, bukti empiris mengenai strategi anti-korupsi yang efektif dalam administrasi perpajakan masih terbatas. Penelitian masa depan bisa melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap intervensi anti-korupsi dalam administrasi perpajakan, menggunakan desain eksperimental atau kuasi-eksperimental.

Keempat, pemahaman kita tentang interaksi antara korupsi, teknologi, dan digitalisasi dalam administrasi perpajakan masih terbatas. Penelitian masa depan bisa mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi, seperti elektronik invoicing, pajak digital, dan analisis data besar, dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kelima, sebagian besar studi yang ada berfokus pada korupsi dan penerimaan pajak di tingkat nasional, dengan perhatian terbatas pada dinamika di tingkat sub-nasional. Penelitian masa depan bisa memperluas fokus ke tingkat sub-nasional, mengeksplorasi variasi dalam hubungan korupsi-penerimaan pajak di berbagai wilayah dan pemerintah daerah.



Keenam, studi yang ada umumnya mengadopsi perspektif disiplin tunggal, dengan sedikit integrasi lintas ekonomi, ilmu politik, administrasi publik, dan psikologi. Penelitian masa depan bisa mengadopsi pendekatan interdisipliner untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai kompleksitas hubungan korupsi-penerimaan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini melakukan Systematic Literature Review mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, menganalisis 87 artikel yang diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed selama periode 2000-2024. Analisis bibliometrik menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam penelitian mengenai topik ini, dengan akselerasi jelas setelah krisis keuangan global 2008-2009. Penelitian tersebar di berbagai disiplin ilmu, dengan konsentrasi dalam ekonomi publik dan studi pembangunan, dan sebagian besar mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan data sekunder.

Analisis tematik mengidentifikasi lima mekanisme utama yang menghubungkan korupsi dengan penerimaan pajak: (1) penggelapan dan penghindaran pajak, (2) pertumbuhan ekonomi informal, (3) distorsi kebijakan fiskal, (4) erosi kepercayaan wajib pajak, dan (5) efisiensi administrasi perpajakan yang rendah. Analisis juga mengidentifikasi tiga faktor kontekstual yang memoderasi hubungan korupsi-penerimaan pajak: kualitas institusi, tingkat pembangunan ekonomi, dan transparansi fiskal, serta dua variabel mediator utama: kepatuhan wajib pajak dan struktur ekonomi.

Berdasarkan temuan ini, penelitian mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menjelaskan kompleksitas hubungan korupsi-penerimaan pajak, yang memiliki implikasi penting untuk pengembangan teori dan praktik. Kerangka ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kontekstual terhadap mengatasi dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, yang mengatasi berbagai mekanisme yang diidentifikasi dan mempertimbangkan faktor moderator dan mediator.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang ada dan menyarankan agenda untuk penelitian masa depan, termasuk analisis yang lebih bernuansa mengenai dampak korupsi terhadap berbagai jenis pajak dan wajib pajak, pengembangan ukuran korupsi yang lebih objektif, evaluasi yang lebih ketat terhadap intervensi anti-korupsi dalam administrasi perpajakan, eksplorasi mengenai peran teknologi dalam mengurangi korupsi dalam administrasi perpajakan, perluasan fokus ke tingkat sub-nasional, dan adopsi pendekatan interdisipliner.

Temuan dari SLR ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan korupsi-penerimaan pajak dan menyediakan dasar untuk pengembangan teori dan praktik yang lebih efektif dalam mengatasi dampak korupsi terhadap penerimaan pajak, yang merupakan tantangan kritis bagi pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik di banyak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, G. T., & Gupta, S. (Eds.). (2002). *Governance, corruption, and economic performance*. International Monetary Fund.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Books.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)



- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & McClellan, C. (2016). Corruption and firm tax evasion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 146-163. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.10.006>
- Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles in OECD countries. *American Journal of Political Science*, 50(3), 530-550. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00200.x>
- Attila, G., Chambas, G., & Combes, J. L. (2009). Corruption and mobilisation of public revenues: An econometric analysis. *Recherches Économiques de Louvain*, 75(2), 229-268. <https://doi.org/10.3917/re.752.0229>
- Bahl, R., & Bird, R. (2018). Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below. Edward Elgar Publishing.
- Barone, G., & Mocetti, S. (2011). Tax morale and public spending inefficiency. *International Tax and Public Finance*, 18(6), 724-749. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9174-z>
- Besley, T., & McLaren, J. (1993). Taxes and bribery: The role of wage incentives. *The Economic Journal*, 103(416), 119-141. <https://doi.org/10.2307/2234340>
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99-120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55-71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2014). Societal institutions and tax effort in developing countries. *Annals of Economics and Finance*, 15(1), 301-351.
- Blackburn, K., Bose, N., & Haque, M. E. (2006). The incidence and persistence of corruption in economic development. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 30(12), 2447-2467. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2005.07.007>
- Boly, A., Gillanders, R., & Miettinen, T. (2019). Deterrence, contagion, and legitimacy in anticorruption policy making: An experimental analysis. *The Journal of Legal Studies*, 48(2), 275-305. <https://doi.org/10.1086/705599>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.
- Chander, P., & Wilde, L. (1992). Corruption in tax administration. *Journal of Public Economics*, 49(3), 333-349. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(92\)90072-N](https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90072-N)
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23-34. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.09.002>
- De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2017). The impact of fiscal transparency on corruption: An empirical analysis based on longitudinal data. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 17(4). <https://doi.org/10.1515/bejeap-2017-0021>
- Dreher, A., & Schneider, F. (2010). Corruption and the shadow economy: An empirical analysis. *Public Choice*, 144(1), 215-238. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9513-0>
- Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm-level evidence. *Journal of Development Economics*, 83(1), 63-75. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.09.009>
- Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of Public Economics*, 76(3), 459-493. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00093-6](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00093-6)



- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2019). Tax capacity and growth: Is there a tipping point? *International Tax and Public Finance*, 26(6), 1329-1354. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09531-2>
- Gauthier, B., & Goyette, J. (2014). Taxation and corruption: Theory and firm-level evidence from Uganda. *Applied Economics*, 46(23), 2755-2765. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.909580>
- Ghura, D. (1998). Tax revenue in sub-Saharan Africa: Effects of economic policies and corruption. *IMF Working Paper*, 98(135). <https://doi.org/10.5089/9781451855685.001>
- Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. *IMF Working Paper*, 07(184). <https://doi.org/10.5089/9781451867480.001>
- Hillman, A. L. (2004). Corruption and public finance: An IMF perspective. *European Journal of Political Economy*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2003.09.004>
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., Nicolau, B., O' Cathain, A., Rousseau, M.-C., & Vedel, I. (2018). Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), version 2018. *Registration of Copyright (#1148552)*, Canadian Intellectual Property Office.
- Imam, P. A., & Jacobs, D. F. (2014). Effect of corruption on tax revenues in the Middle East. *Review of Middle East Economics and Finance*, 10(1), 1-24. <https://doi.org/10.1515/rmeef-2014-0001>
- Johnson, S., Kaufmann, D., McMillan, J., & Woodruff, C. (2000). Why do firms hide? Bribes and unofficial activity after communism. *Journal of Public Economics*, 76(3), 495-520. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00094-8](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00094-8)
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Liu, Y., & Feng, H. (2015). Tax structure and corruption: Cross-country evidence. *Public Choice*, 162(1), 57-78. <https://doi.org/10.1007/s11127-014-0194-y>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Blackwell Publishing.
- Reinikka, R., & Svensson, J. (2005). Fighting corruption to improve schooling: Evidence from a newspaper campaign in Uganda. *Journal of the European Economic Association*, 3(2-3), 259-267. <https://doi.org/10.1162/jeea.2005.3.2-3.259>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax non-compliance and perceptions of corruption: Policy implications for developing countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25-60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies: Size, causes, and consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (2000). Corruption, growth, and public finances. *IMF Working Paper*, 00(182). <https://doi.org/10.5089/9781451859256.001>
- Torgler, B. (2005). Tax morale in Latin America. *Public Choice*, 122(1), 133-157. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank Group.